



SUMBER BERITA

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU II FKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSTIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Proyek Jamban Juga Dikorupsi

Kerugian Negara Rp 439,5 Juta

ARGA MAKMUR - Inspektorat Bengkulu Utara (BU) sudah menuntaskan audit atas kerugian negara dalam penggunaan Dana Desa (DD) Kali. Audit ini berdasarkan permintaan penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) BU. Hasilnya, ditemukan kerugian negara Rp 439,5 juta dalam pelaksanaan DD tahun anggaran 2020 itu.

Data terhimpun **RB**, total kerugian negara Rp 439,5 juta tersebut berasal dari beberapa kegiatan. Diantaranya ditemukan Rp 336 juta yang merupakan dana Sisa Lebih Penggunaan Ang-

garan (SilPA) yang harusnya ada di rekening SilPA.

Dana tersebut dari program kerja yang tidak dikerjakan dan dananya sudah sempat dicairkan. Namun hingga saat ini dana tersebut tidak disetorkan ke rekening SilPA. Hal ini diduga dari pekerjaan-pekerjaan fiktif.

Selain pekerjaan yang diduga fiktif tersebut, ada juga pekerjaan yang memang tidak sesuai dengan program yang harusnya dijalankan. Diantaranya adalah pekerjaan proyek pembangunan jamban atau WC sebesar Rp 23,4 juta. Tak hanya itu, ada juga bidang penyelenggaraan Rp 70,5 juta yang berisi program penyuluhan posyandu, penyuluhan pendidikan bagi masyarakat, penyelenggaraan desa staga hingga pembuatan jaringan internet. Bahkan dana untuk pengembangan lembaga alat dan PKK Rp 8 juta juga muncul kerugian negara.

Inspektur Inspektorat BU, Eka Hendriyadi, SH, MH

memastikan audit tersebut sudah tuntas dilakukan. Inspektorat akan mengirimkan hasil audit ke penyidik kejaksaan. "Menegenai hasilnya silakan koordinasi langsung ke jaksa sebagai institusi yang meminta dilakukan audit. Karena ini audit khusus sesuai permintaan aparat penegak hukum," pungkas Eka.

Terkait hal itu, Kajari BU Elwin Agustian Khahar, SH, MH melalui Kasi Intel Denny Agustian, SH, MH menuturkan penyidik akan mempelajari lebihdulu hasil audit tersebut. Jaksa juga sudah menetapkan satu tersangka atas kasus tersebut yaitu kades non aktif Sadi Darmanto.

"Memang sejak awal kita sudah menemukan dan meyakini terjadinya kerugian negara dari program yang tidak dikerjakan. Sehingga sudah kita lakukan penyidikan dan penetapan tersangka hingga penahanan," beber Denny. (qia)